

PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH

Siska Yulia Defitri¹, Sindy Fetrisia², Witra Maison³

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Sumatera Barat

siskayd023@gmail.com, sindysandela05@gmail.com, witra21@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan, dan pengeluaran daerah terhadap kinerja keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dari laporan keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, tetapi dana perimbangan memiliki pengaruh dan memiliki hubungan negatif dengan kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan pengeluaran daerah tidak berpengaruh dan positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara keseluruhan, kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan kualitas pekerjaan daerah dalam memajukan daerah mereka yang dapat diilustrasikan oleh kekayaan yang dimiliki oleh daerah, menyeimbangkan dana yang dimiliki dan belanja di daerah.

Kata kunci : Kinerja Keuangan, Kekayaan Daerah, Belanja Daerah

ABSTRACT

This study aims to analyze the Effect of Regional Wealth, Balancing Funds and Regional Expenditures on Regional Financial Performance in West Sumatra Province. This research using secondary data, the technique of data collection is done through documentation, namely from the financial statements of districts and cities in West Sumatra Province. The results showed that there was a significant influence of regional wealth on the financial performance of the local government, but the balance funds had an influence and had a negative relationship to the financial performance of the local government while the regional expenditure had no effect and was positive on the financial performance of the local government. Overall, the financial performance of local governments shows the quality of regional work in advancing their regions which can be illustrated by the wealth owned by the regions, balancing funds owned and shopping in the regions.

Keywords : Financial Performance, Regional Wealth, Regional Expenditure

PENDAHULUAN

Kinerja pemerintah daerah merupakan hasil dari pencapaian program/kebijakan pemerintah dalam

melaksanakan tugasnya pada suatu organisasi. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu sendiri, pemerintah harus mampu mengelola keuangan daerah dengan baik sesuai

dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran dapat melihat hasil kerja pemerintah daerah dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah.

Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah. Hal ini sering dijumpai bahwa pendapatan asli daerah masih jauh lebih kecil dari dana perimbangan (Armaja, Ibrahim, & Aliamin, 2015). Padahal pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber kekayaan daerah yang nyatanya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Armaja et al., 2015; Ayuningsih, 2016). Namun hasil lain menjelaskan bahwa besarnya kekayaan yang dimiliki suatu daerah tidak menunjukkan keterkaitan antara kinerja keuangan yang dihasilkan daerah namun *intergovernmental revenue* (pendapatan daerah) yang lebih berperan dalam menunjukkan kinerja keuangan (Minarsih, 2015). Artinya kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah (Minarsih, 2015; Retnowati, 2016).

Salah satu keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun pada kenyataannya pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana bantuan pusat yang disebut Dana

Perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Upaya untuk mengurangi ketimpangan baik vertikal maupun horizontal diperlukan adanya dana pusat yang diserahkan ke daerah.

Dalam penelitian Armaja et al (2015) menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, namun penelitian lain menemukan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Badjra, Mustanda, & Abundanti, 2017; Putri & Darmayanti, 2019; Wafa, 2018) bahkan memiliki hubungan yang negatif (Purnama, 2016; Wahyuningsih, 2016). Hal ini disebabkan bahwa tingginya penerimaan dana perimbangan menunjukkan bahwa rendahnya pengelolaan keuangan yang dilakukan daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Kinerja keuangan diwujudkan dari jumlah belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan umum, serta sistem jaminan sosial. Pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat jika belanja daerah semakin tinggi, hal ini dibuktikan dari Armaja et al (2015) dan Retnowati (2016). Perbedaan hasil penelitian sebelumnya dari faktor penentu kinerja keuangan daerah di beberapa pemerintah daerah di Indonesia membutuhkan analisis mendalam dalam mengambil kebijakan dalam pengelolaan keuangan di daerah

berikutnya. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

- H1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan daerah di kabupaten dan kota provinsi Sumatera Barat
- H2: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah di seluruh kabupaten dan kota provinsi Sumatera Barat
- H3: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat
- H4: Terdapat pengaruh yang signifikan antara kekayaan daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah secara simultan terhadap kinerja keuangan daerah di seluruh kabupaten dan kota provinsi Sumatera Barat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal. Sementara itu Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *sensus sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di semua Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016-2017. Variabel kekayaan daerah diukur dari realisasi pendapatan asli daerah, sementara untuk variabel dana perimbangan dan belanja daerah

diukur dengan jumlah realisasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Variabel kinerja keuangan daerah diukur dengan menggunakan rasio kemandirian daerah, rasio ini dipilih karena dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam membangun daerah dengan mengendalikan sumber dana ekstern dan tingkat partisipasi masyarakat. Persamaan model empiris yang digunakan dalam meneliti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots \dots (1)$$

Keterangan dari persamaan diatas adalah sebagai berikut: Y merupakan kinerja keuangan, X_1 merupakan kekayaan daerah, X_2 adalah dana perimbangan, X_3 merupakan belanja daerah, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ merupakan koefisien X_1, X_2, X_3 , α merupakan konstanta, dan ε merupakan *error terms*. Teknik analisis yang digunakan adalah *statistic inferensial* melalui pengujian asumsi klasik dan uji hipotesis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekayaan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan proksi total PAD yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah di 19 Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016-2017 yang diperoleh dari kantor BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit, diketahui bahwa nilai kekayaan pemerintah daerah tertinggi pada dua tahun tersebut diperoleh oleh Kota Padang. Hal yang sama juga dimiliki untuk penerimaan dana perimbangan yang diukur dengan menjumlahkan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi

Khusus dan jumlah belanja daerah yang tetap diungguli oleh Kota Padang untuk realisasi terbesar dibandingkan dengan pemerintah kabupaten dan kota lainnya.

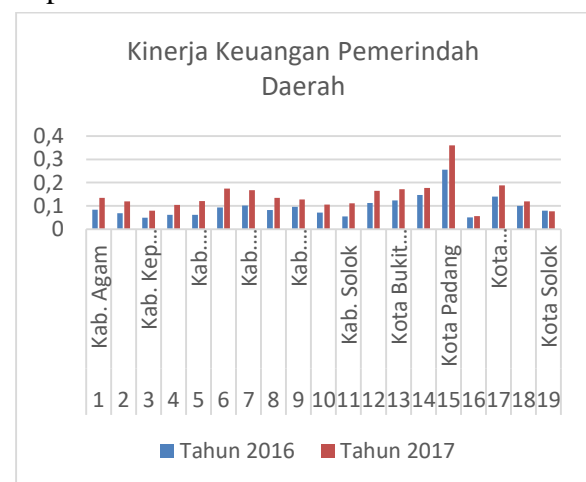
Besarnya penerimaan suatu daerah juga menimbulkan besarnya pengeluaran dalam bentuk belanja oleh pemerintah daerah tersebut, artinya adanya hubungan hubungan positif dalam melakukan pengelolaan keuangan yang dapat ditunjukkan dalam kinerja keuangan yang diukur dari rasio kemandirian pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan rasio kemandirian dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1. Kinerja Keuangan

No.	Nama Kab/ Kota	Tahun	
		2016	2017
1	Kab. Agam	0,084	0,134
2	Kab. Dhamasraya	0,069	0,119
3	Kab. Kep Mentawai	0,049	0,08
4	Kab. Lima Puluh Kota	0,061	0,104
5	Kab. Padang Pariaman	0,062	0,121
6	Kab. Pasaman Barat	0,093	0,175
7	Kab. Pasaman	0,101	0,168
8	Kab. Pesisir Selatan	0,082	0,134
9	Kab. Sijunjung	0,096	0,127
10	Kab. Solok Selatan	0,071	0,105
11	Kab. Solok	0,055	0,111
12	Kab. Tanah Datar	0,112	0,165
13	Kota Bukit Tinggi	0,124	0,172
14	Kota Padang Panjang	0,147	0,177
15	Kota Padang	0,255	0,360
16	Kota Pariaman	0,05	0,056
17	Kota Payakumbuh	0,14	0,188
18	Kota Sawahlunto	0,1	0,12
19	Kota Solok	0,079	0,077

Sumber: BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Barat

Dari tabel 1 diketahui bahwa Kota Padang memiliki kinerja keuangan yang tertinggi 2 tahun berturut-turut pada tahun 2016 dan tahun 2017 dengan nilai 25,5% dan 36,6% hal ini menunjukkan bahwa Kota Padang memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan daerah secara maksimal tanpa tergantung dari sumber keuangan eksternal. Salah satu penyebabnya adalah sumber pendapatan asli daerah yang lebih besar dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya. Sumber pendatan asli daerah lebih besar karena lebih banyaknya jumlah sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri seperti pajak dan retribusi daerah serta kekayaan daerah lainnya. Hasil kinerja keuangan dilihat dari grafiknya secara keseluruhan setiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat dapat dilihat berikut ini:



Gambar 1. Grafik Kinerja Keuangan

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa pada umumnya kinerja keuangan semua pemerintahan daerah kab/kota di provinsi Sumatera Barat menunjukkan peningkatan setiap tahun. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada Kota Padang jika dibandingkan dengan kab/ kota lainnya, hal ini tidak dipungkiri salah

satu disebabkan oleh Kota Padang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dan tingginya pertumbuhan ekonomi dengan berbagai infrastruktur yang menunjang seperti pelabuhan dan bandara.

Pengujian dilakukan untuk mengetahui hasil penelitian yang kemudian akan dianalisis. Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berdistribusi normal. Dari hasil pengujian diketahui bahwa tingkat signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* $0,646 > 0,05$, hal ini dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hasil pengujian dapat dilihat dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Hasil One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

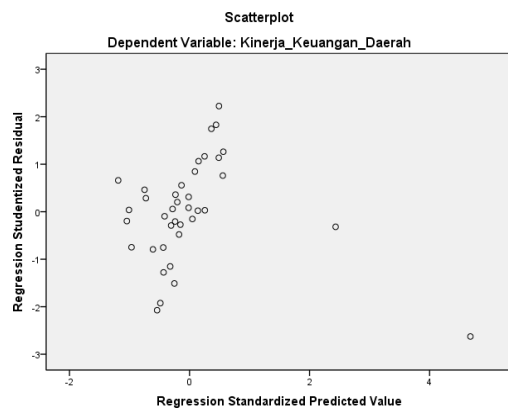
		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		38
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	,01789750
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,120
	<i>Positive</i>	,072
	<i>Negative</i>	-,120
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		,739
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,646

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan varian residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar *Scatterplot* yang menguji nilai prediksi variabel (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID) yang

dapat dihasilkan dalam gambar *Scatterplot* sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas pada gambar 2 bahwa pada grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi dan layak digunakan dalam meneliti. Sementara itu untuk uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, dengan bantuan alat statistik telah dihasilkan tabel *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk uji multikolinearitas pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
Kekayaan_Daerah	,541	1,847
Dana_Perimbangan	,528	1,894
Belanja_Daerah	,966	1,036

a. Dependent Variable: Kinerja_Keuangan_Daerah

Dari tabel 3 diatas didapatkan hasil bahwa nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel kekayaan daerah masing-masing sebesar 0,541 dan 1,847, sementara variabel dana perimbangan diperoleh 0,528 untuk nilai *tolerance* dan 1,894 untuk nilai VIF sedangkan untuk variabel belanja daerah diperoleh 0,966 dan 1,036 untuk nilai *tolerance* dan VIF.

Dengan demikian nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel independen dalam penelitian ini tidak kurang dari 0,1 dan nilai VIF tidak lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen sehingga dapat dilanjutkan ketahap berikutnya.

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen yaitu kekayaan daerah (X1), dana perimbangan (X2), dan belanja daerah (X3) terhadap variabel dependen kinerja keuangan (Y)

Tabel 4. Hasil Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	,128	,011	
Kekayaan_Daerah	7,713	,000	1,223
Dana_Perimbangan	-1,190	,000	-,512
Belanja_Daerah	7,126	,000	,024

a. Dependent Variable: Kinerja_Keuangan_Daerah

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh model persamaan regresi linier sebagai berikut :

$$Y=0,128+7,713X1-1,190X2+7,126X3 + e$$

Dari persamaan diatas diketahui bahwa kekayaan daerah dan belanja

daerah memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan, artinya peningkatan kekayaan daerah dan belanja daerah akan berdampak pada peningkatan kemampuan daerah dalam mengembangkan daerah dan membangun daerahnya sendiri yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Namun berbanding terbalik untuk dana perimbangan yang diketahui memiliki hubungan negatif, diketahui dana perimbangan berasal dari pemerintah pusat kepada daerah dalam membantu pendapatan daerah, hal ini sedikit banyaknya akan menimbulkan kesan bahwa lemahnya sumber ekonomi pemerintah daerah yang berhubungan dengan kinerja keuangan di daerah.

Untuk uji t akan memberikan gambaran seberapa signifikan variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Uji t

Model	T	Sig.
1 (Constant)	11,987	,000
Kekayaan_Daerah	17,751	,000
Dana_Perimbangan	-7,333	,000
Belanja_Daerah	,460	,649

a. Dependent Variable: Kinerja_Keuangan_Daerah

Dari tabel hasil pengujian coefficient diatas diketahui bahwa diperoleh nilai t hitung sebesar 17,751 dengan nilai t tabel diketahui 2,032 dan signifikansi 0,000 dengan taraf signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan

daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat dapat diterima.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Julitawati et al. (2012), yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam pemilikan potensi, penggalan, dan pengelolaan potensi yang baik sehingga semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah serta memaksimalkan penerimaan daerah sehingga menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan yang bersih yang berhak diakui pemerintah daerah yang mana pemerintah daerah berwenang dan memiliki kebebasan dalam hal mengelola sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah maka menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan optimalisasi potensi dan sumber pendapatan suatu daerah tersebut sehingga akan memaksimalkan penerimaan pemerintahan daerah yang nantinya akan berdampak pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang semakin baik.

Untuk pengujian hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini diperoleh nilai t hitung sebesar 7,333 artinya t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal

ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu (Nugroho & Prasetyo, 2018) yang menjelaskan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kota Jawa Timur.

Dana Perimbangan pada Penelitian lain menggunakan istilah *intergovernmental revenue*, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu, untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat akan mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, adanya kewajiban pemerintah pusat kepada daerah masih sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah sehingga diperlukan dana perimbangan untuk mempercepat pembangunan daerah.

Tingkat kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi hal ini bergantung kondisi daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam atau tidak, daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah, serta adanya kewajiban untuk

menjaga ketercapaian standar pelayanan minimum di setiap daerah. Daerah dengan sumber daya yang sedikit memerlukan subsidi atau Dana Perimbangan agar dapat mencapai standar pelayanan minimum itu. Oleh karena itu dengan adanya Dana Perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat sangat membantu pemerintah daerah dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah.

Pengujian hipotesis ketiga (H3) ditemukan hasil bahwa t hitung diperoleh 0,460 dengan signifikansi lebih dari 5%, sehingga dapat diputuskan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa besaran belanja daerah yang dikeluarkan tidak dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini dipengaruhi pelayanan publik yang dilakukan semakin meningkat termasuk dalam peningkatan kegiatan kesejahteraan yang masih tetap dilakukan maupun dalam masih tetap dilakukan secara maksimal oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan kota.

Hasil yang sama juga disampaikan oleh Nugroho & Prasetyo (2018), yang menjelaskan bahwa ketidakpengaruhannya belanja modal terhadap kinerja keuangan disebabkan oleh penggunaan belanja untuk hal-hal yang sifatnya tidak produktif.

Sementara itu untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dapat dilihat dari output SPSS yang dilihat dari tabel ANNOVA, dengan melihat kolom F dan signifikannya. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 6 dengan hasil F hitung diperoleh 118,350 dengan

tingkat signifikansi 0,000 pada taraf sig 5% , artinya kekayaan daerah, dana perimbangan dan belanja daerah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kekayaan daerah, dana perimbangan dan belanja daerah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 6. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	F	Sig.
1 Regression	,124	3	118,350	,000 ^a
Residual	,012	34		
Total	,136	37		

- a. Predictors:(Constant), Belanja_Daerah, Kekayaan_Daerah, Dana_Perimbangan
 b. Dependent Variable: Kinerja_Keuangan

Uji Koefisien Determinasi (R^2), dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel *model summary* dibawah ini.

Dari tabel diatas diketahui nilai Untuk mengetahui kontribusi variabel independen dalam membentuk variabel dependen maka dilihat dari *Adjusted R²*, karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen dan nilai *Adjusted R²* dapat naik atau turun berdasarkan signifikansi variabel independen. Hasil uji koefisien Determinasi (R^2) terdapat pada tabel 7 berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,955 ^a	,913	,905	,01867

- a. Predictors:(Constant), Belanja_Daerah, Kekayaan_Daerah, Dana_Perimbangan
 b. Dependent Variable: Kinerja_Keuangan

Tabel 7 diatas merupakan hasil pengolahan data untuk melihat hasil uji koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini. Diketahui bahwa nilai *Adjusted R²* diperoleh sebesar 0,905 atau 90,5%. Hal ini berarti bahwa variabel independen yaitu kekayaan daerah, dana perimbangan dan belanja daerah dapat menjelaskan kinerja keuangan sebesar 90,5%, Sedangkan sisanya 9,5% dijelaskan oleh variabel lain seperti

Kekayaan daerah yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan semakin tinggi tingkat kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah maka akan menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya dan meningkatkan kinerja keuangan daerahnya. Sedangkan untuk variabel dana pertimbangan menunjukkan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, namun memiliki hubungan yang negatif.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa kekayaan daerah, dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat, dikarenakan pemerintah lebih banyak membiayai pengeluaran untuk belanja pegawai daripada pengeluaran untuk pembangunan daerah itu sendiri.

Saran dalam penelitian selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan yang serupa disarankan agar memilih

variabel yang lebih luas dan tidak mengacu selalu pada variabel yang sama serta melakukan penelitian dengan rentang periode waktu yang lebih panjang. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat diharapkan lebih mengembangkan potensi dan sektor-sektor ekonomi daerah untuk dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah agar lebih mandiri secara finansial dalam mendanai seluruh aktivitas pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Armaja, Ibrahim, R., & Aliamin. (2015). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Pespektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168–181.
- Ayuningsih, D. (2016). *Pengaruh Size, Wealth, Leverage, Belanja Daerah dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah*.
- Badjra, I. B., Mustanda, I. K., & Abundanti, N. (2017). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 29–40.
- Minarsih, R. A. (2015). *Pengaruh Size, Wealth, Leverage dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah*.

- Nugroho, T. R., & Prasetyo, N. E. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. *ASSETS Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 27–34.
- Purnama, W. A. (2016). *Pengaruh Komponen PAD, Leverage, dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)*.
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Journal Manajemen*, 8(5), 2834–2861.
- Retnowati, R. (2016). *Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Wafa, M. S. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wahyuningsih, Y. E. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah*